



# LAPORAN TREND VONIS KORUPSI 2024

Rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan hanya 3 tahun 3 bulan  
dengan rata-rata denda Rp180 juta.

4 Desember 2025

# TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN TREN VONIS KORUPSI 2024

Memberikan gambaran dan analisis mengenai  
sejauh mana kinerja aparat penegak hukum  
(KPK dan Kejaksaan) dalam penegakan hukum  
tindak pidana korupsi

Memberikan gambaran dan analisis mengenai  
sejauh mana pengadilan menjatuhkan pidana  
terhadap terdakwa korupsi

Memberikan rekomendasi perbaikan  
penegakan hukum tindak pidana korupsi  
kepada KPK, Kejaksaan, dan Pengadilan

1

2

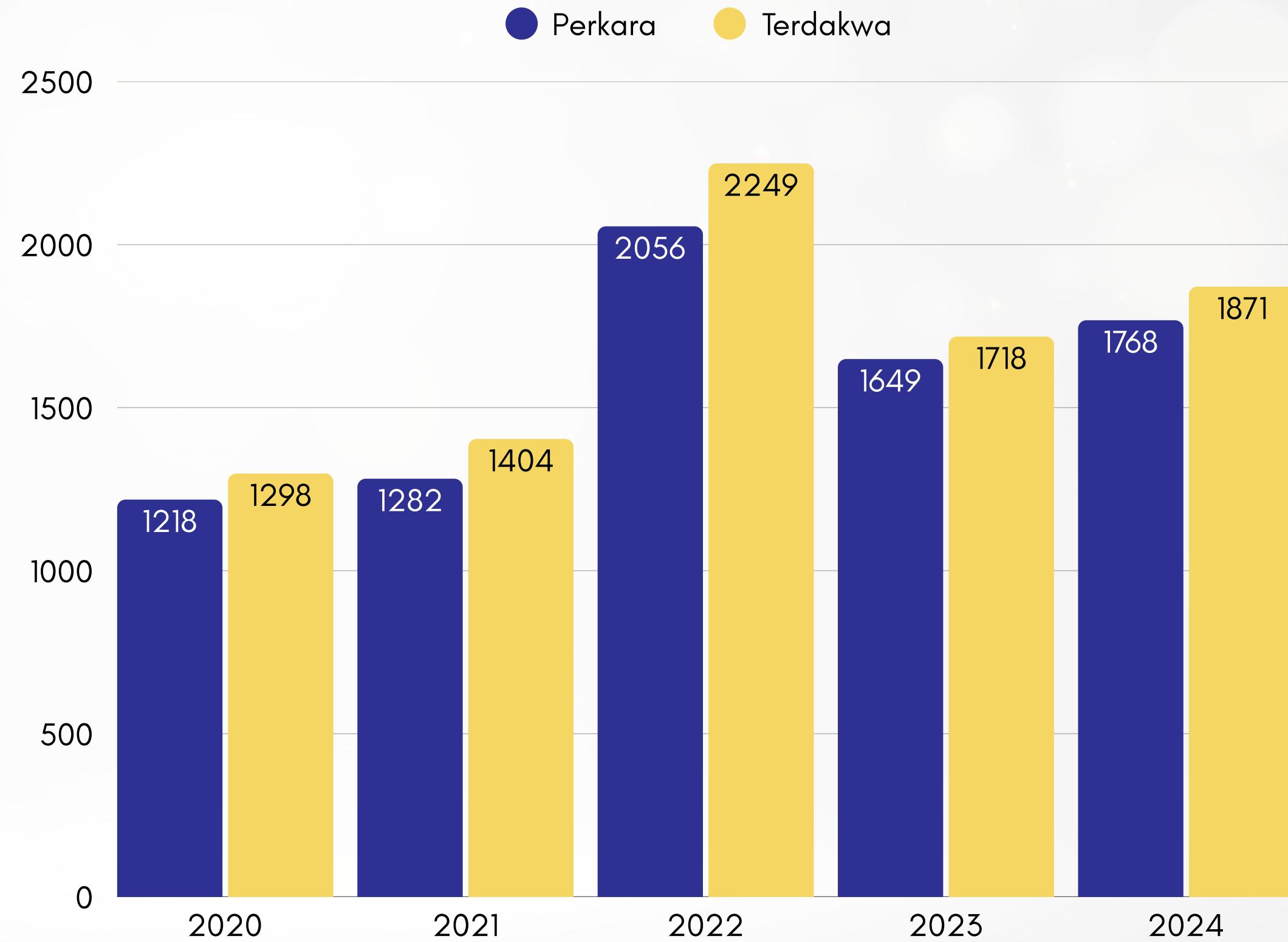
3

# METODOLOGI LAPORAN TREN VONIS KORUPSI 2024

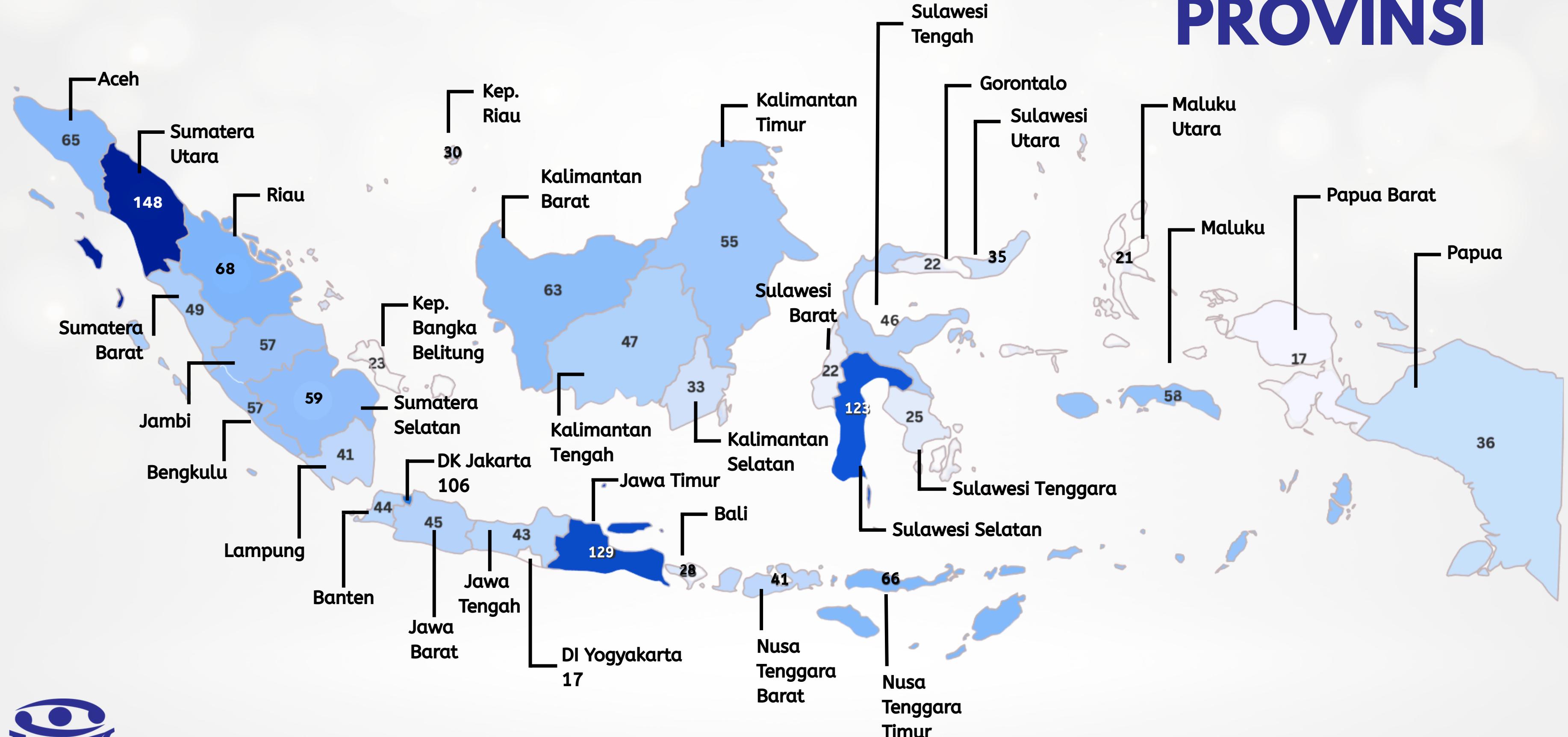


# JUMLAH PERKARA YANG BERHASIL DIHIMPUN PADA TAHUN 2024

Laporan Tahunan MA 2024 menyebutkan bahwa perkara tipikor yang diputus berjumlah 3.605 putusan. Artinya, sebanyak 1.837 putusan atau setara 50.96% putusan yang tidak tersedia.



# PEMETAAN PROVINSI



# KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

Rp330.933.799.608.567

SUAP

Rp790.203.729.969

PUNGUTAN  
LIAR

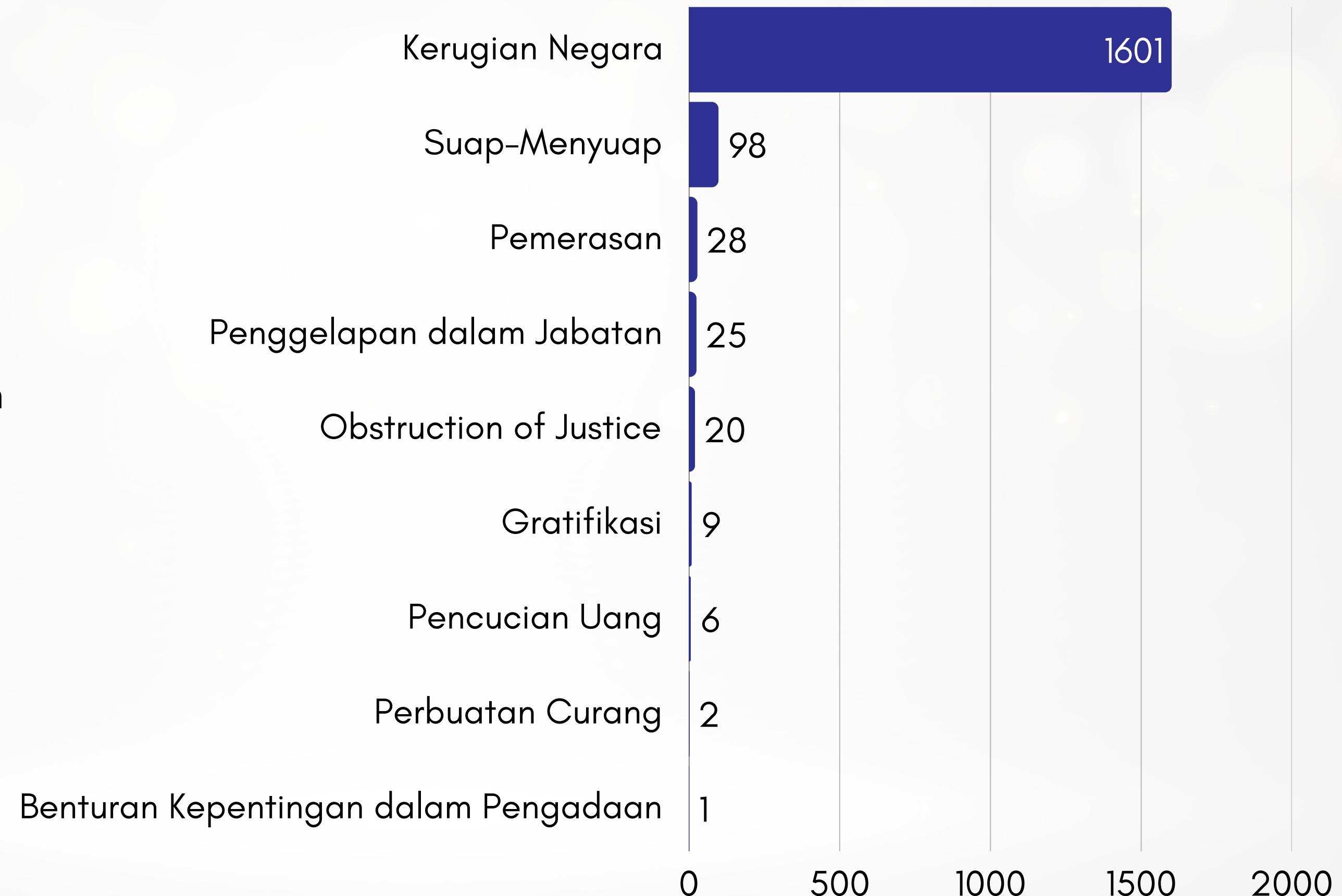
Rp41.217.594.619

PENCUCIAN  
UANG

Rp7.814.541.910.139

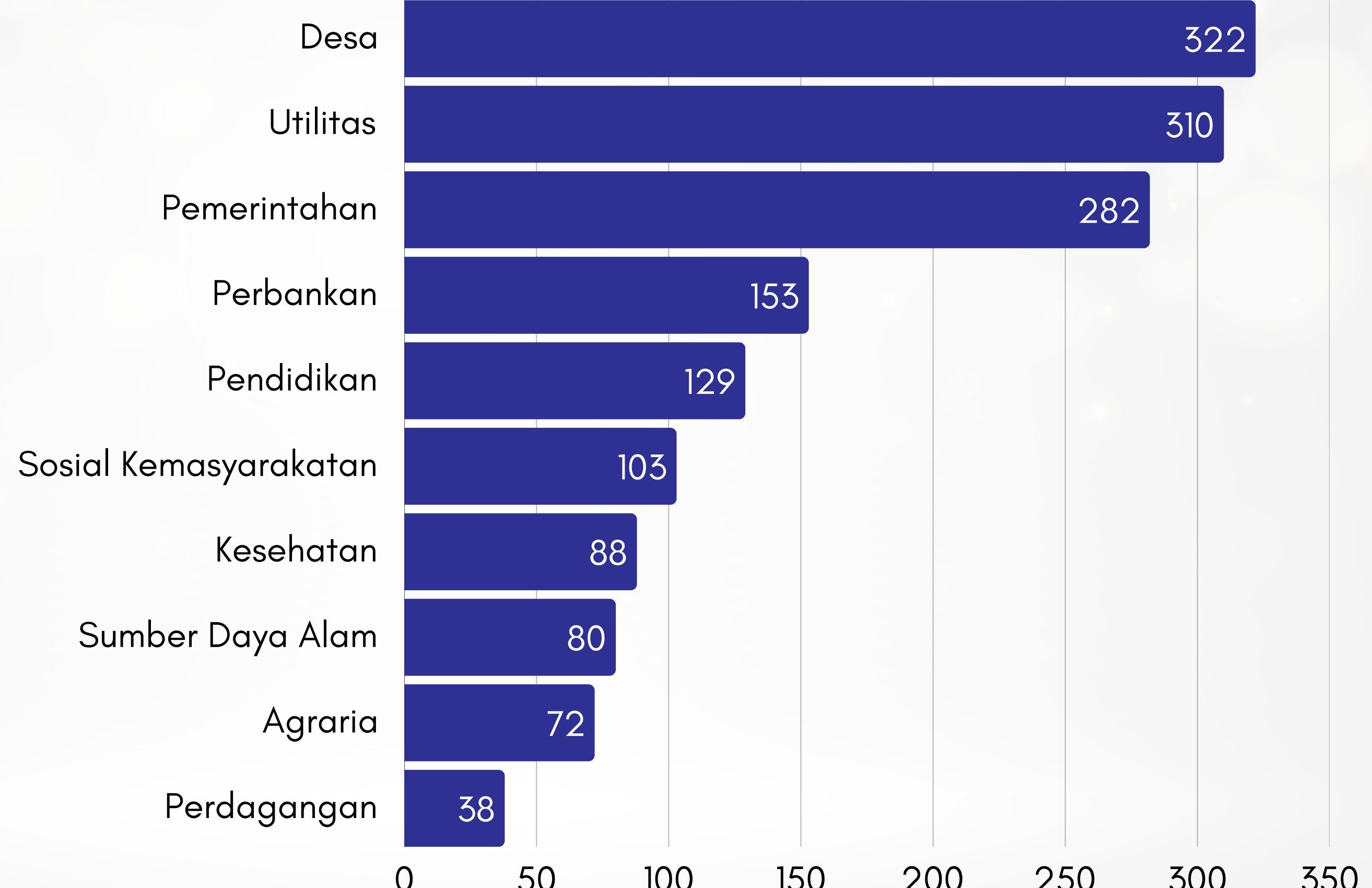
# PEMETAAN JENIS KORUPSI

Pola jenis korupsi kerugian negara masih mendominasi. 90,55% perkara menggunakan pasal kerugian negara.



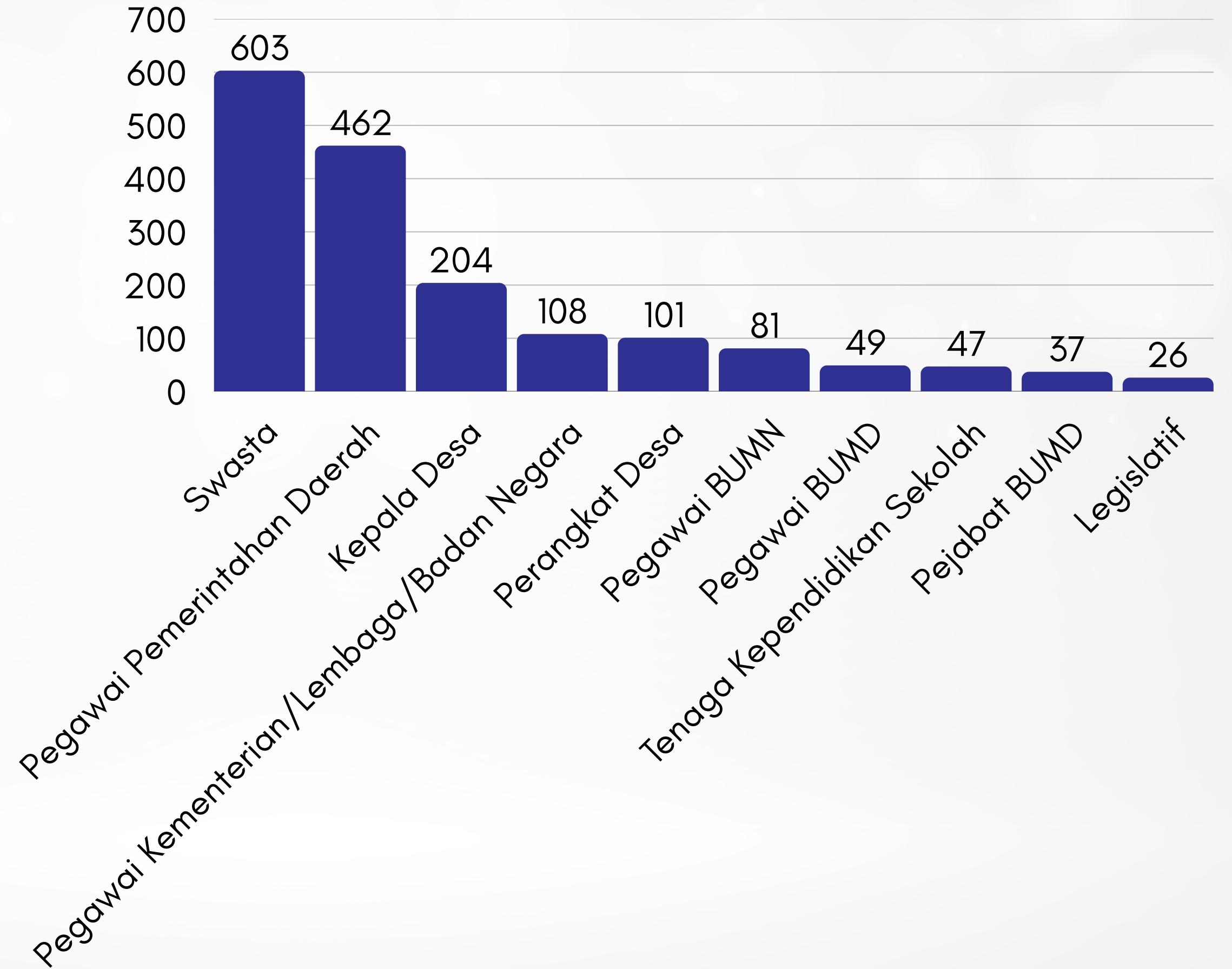
# PEMETAAN KATEGORI PERKARA

Kategori desa, utilitas, pemerintahan, dan perbankan masih menjadi kategori paling tinggi, setidaknya sejak 2022 dan 2023



# PEMETAAN PEKERJAAN TERDAKWA

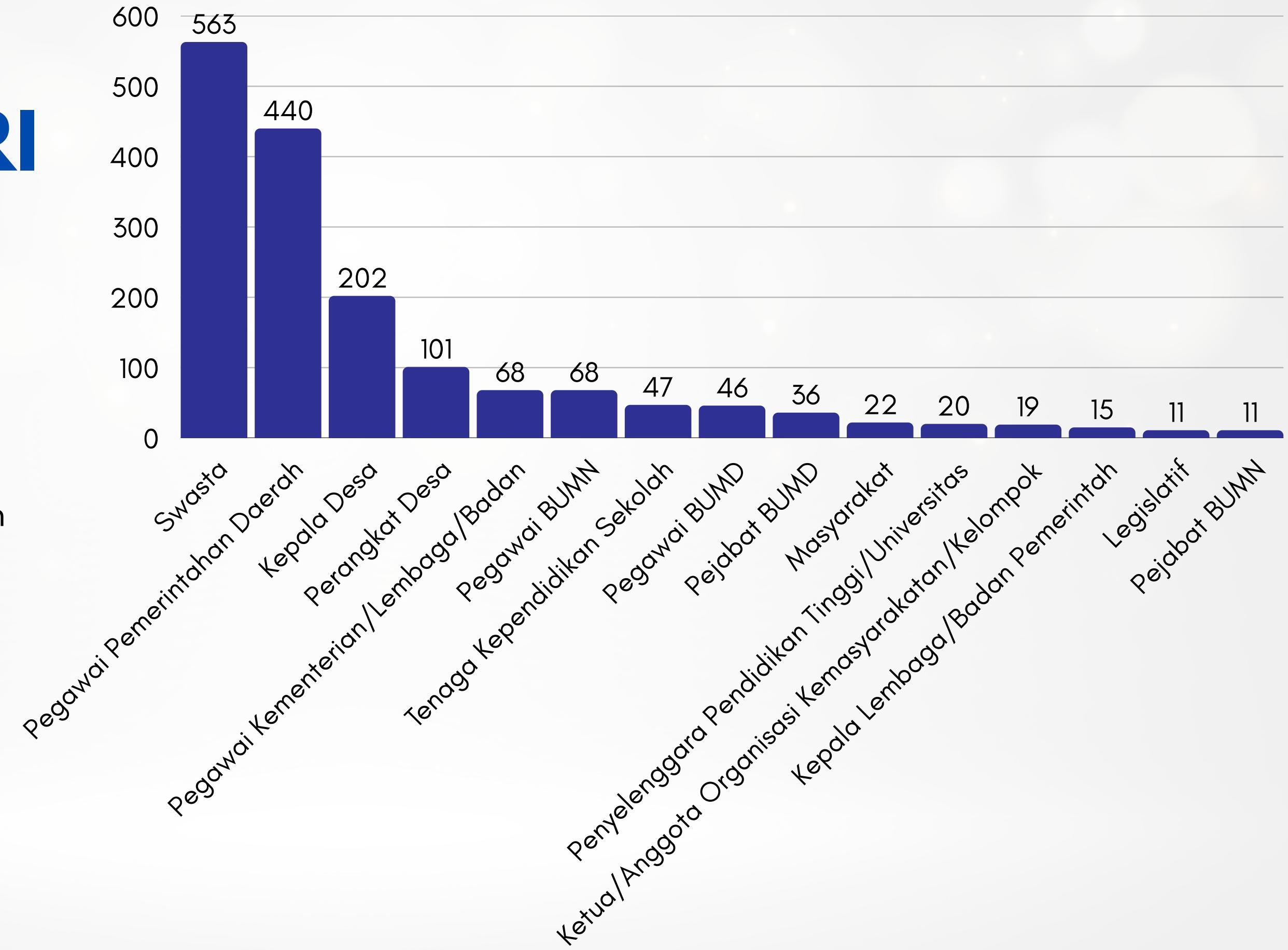
Pekerjaan strategis hanya berjumlah 110 terdakwa, di antaranya legislatif, pejabat BUMN dan BUMD, kepala lembaga/badan pemerintahan, dan menteri



# KINERJA KEJAKSAAN RI



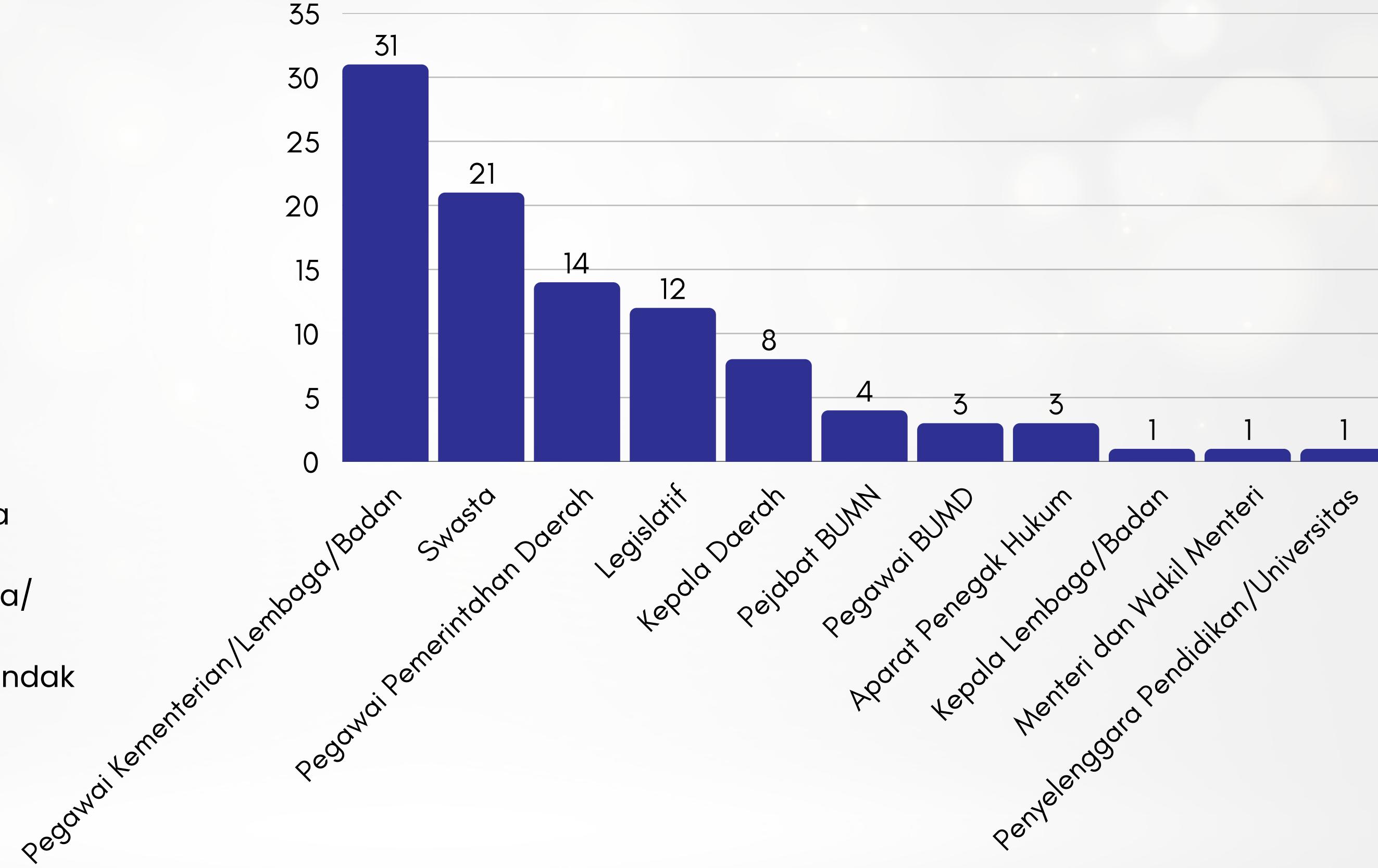
- 1.723 terdakwa dalam 1.648 putusan
- Swasta menjadi latar pekerjaan tertinggi yang ditindak oleh Kejaksaan RI
- Kejaksaan RI berhasil menindak 6 korporasi



# KINERJA KPK



- 99 terdakwa dengan 71 perkara
- KPK paling banyak menindak pegawai kementerian/lembaga/badan negara
- Terdakwa *high profile* yang ditindak berjumlah 26 terdakwa



# KINERJA PENUNTUT UMUM

		Kejaksaan RI	KPK
Penjara	Tertinggi	20 tahun	15 tahun
	Terendah	1 tahun	2 tahun
	Rata-rata	4 tahun 7 bulan	5 tahun 7 bulan
Denda	Tertinggi	75.000.000.000	1.000.000.000
	Terendah	10.000.000	50.000.000
	Rata-rata	265.746.132	394.444.444
Uang Pengganti	Tertinggi	4.571.438.592.561	211.717.896.144
	Terendah	1.305.000	34.000.000
	Rata-rata	20.681.239.809	11.341.730.761

# TEMUAN RATA-RATA VONIS TERDAKWA KORUPSI

1

Rata-rata pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tipikor adalah 3 tahun 3 bulan, atau 39 bulan.

2

Total pidana denda adalah Rp316.294.711.000, dengan rata-rata Rp180.296.516.

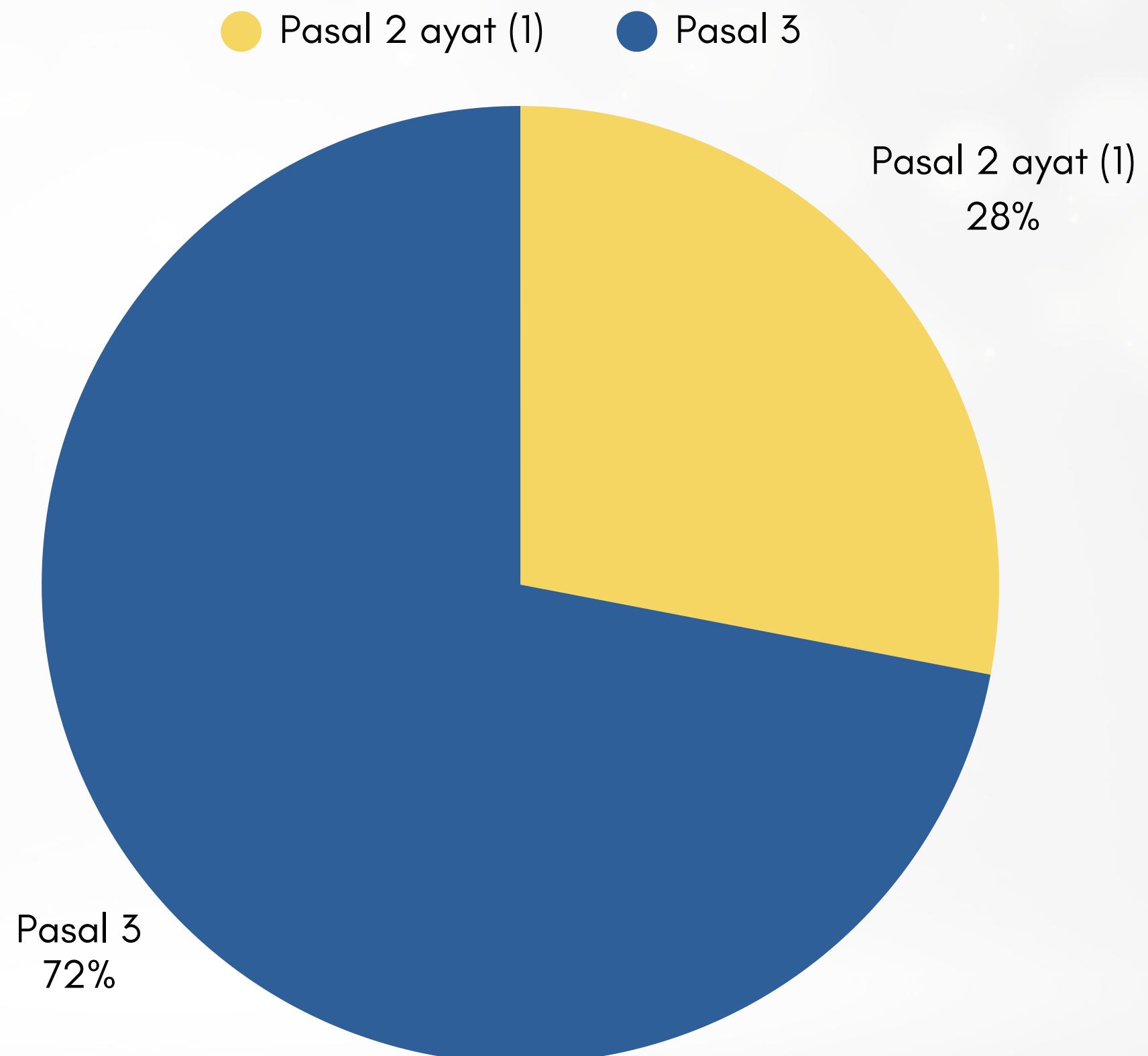
3

Total aset yang dirampas pada seluruh tindak pidana korupsi sebesar Rp16.589.705.753.869.

# PEMETAAN **PASAL VONIS**

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3  
masih menjadi Pasal yang  
sering digunakan.

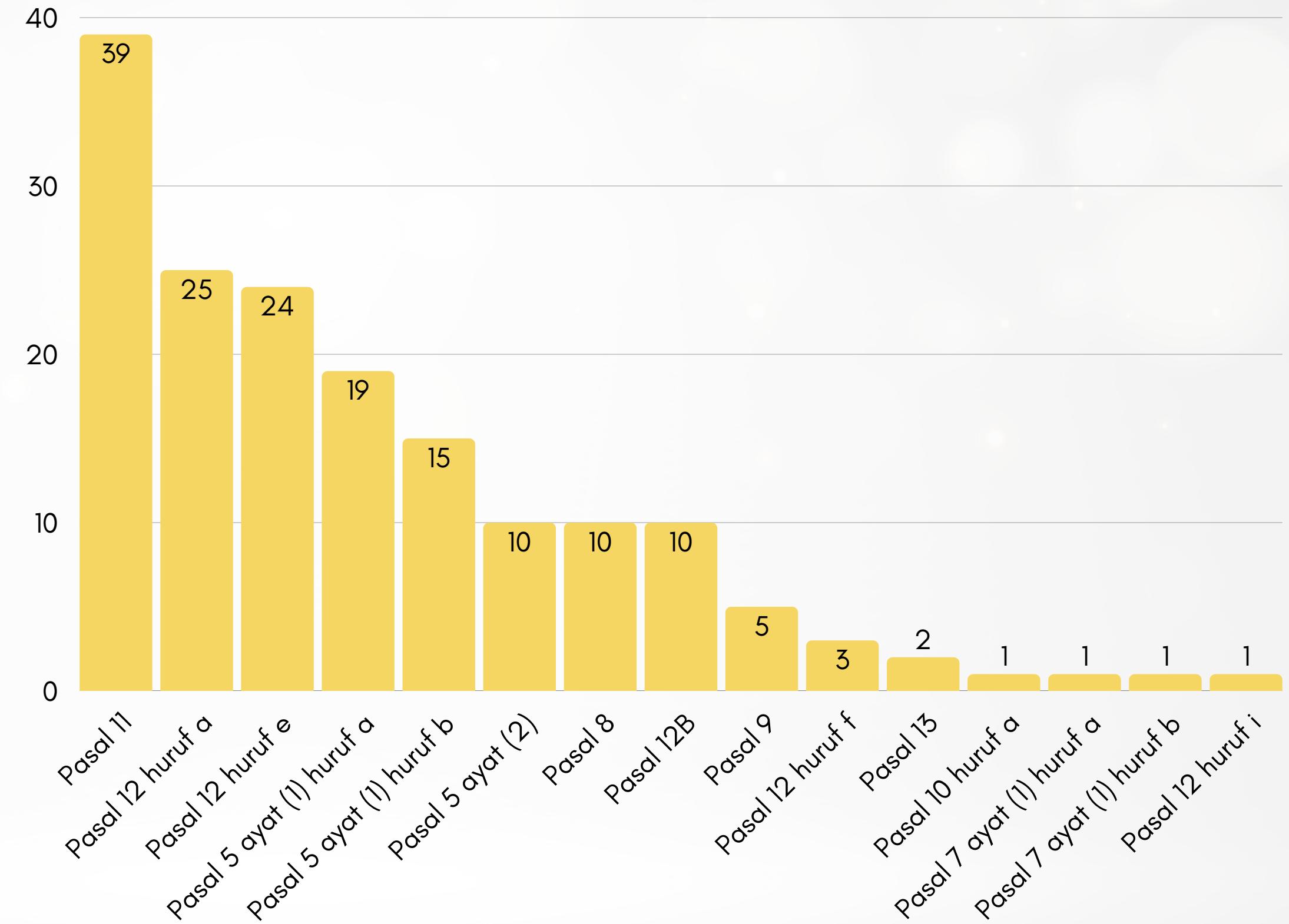
Pasal 2 ayat (1): 437 terdakwa  
Pasal 3: 1.123 terdakwa



# PEMETAAN PASAL VONIS

Setelah Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, paling banyak adalah pasal suap. Pasal suap tersebar di beberapa pasal, berjumlah 120 terdakwa.

Hal ini mengindikasikan jual beli kewenangan masih sangat tinggi.



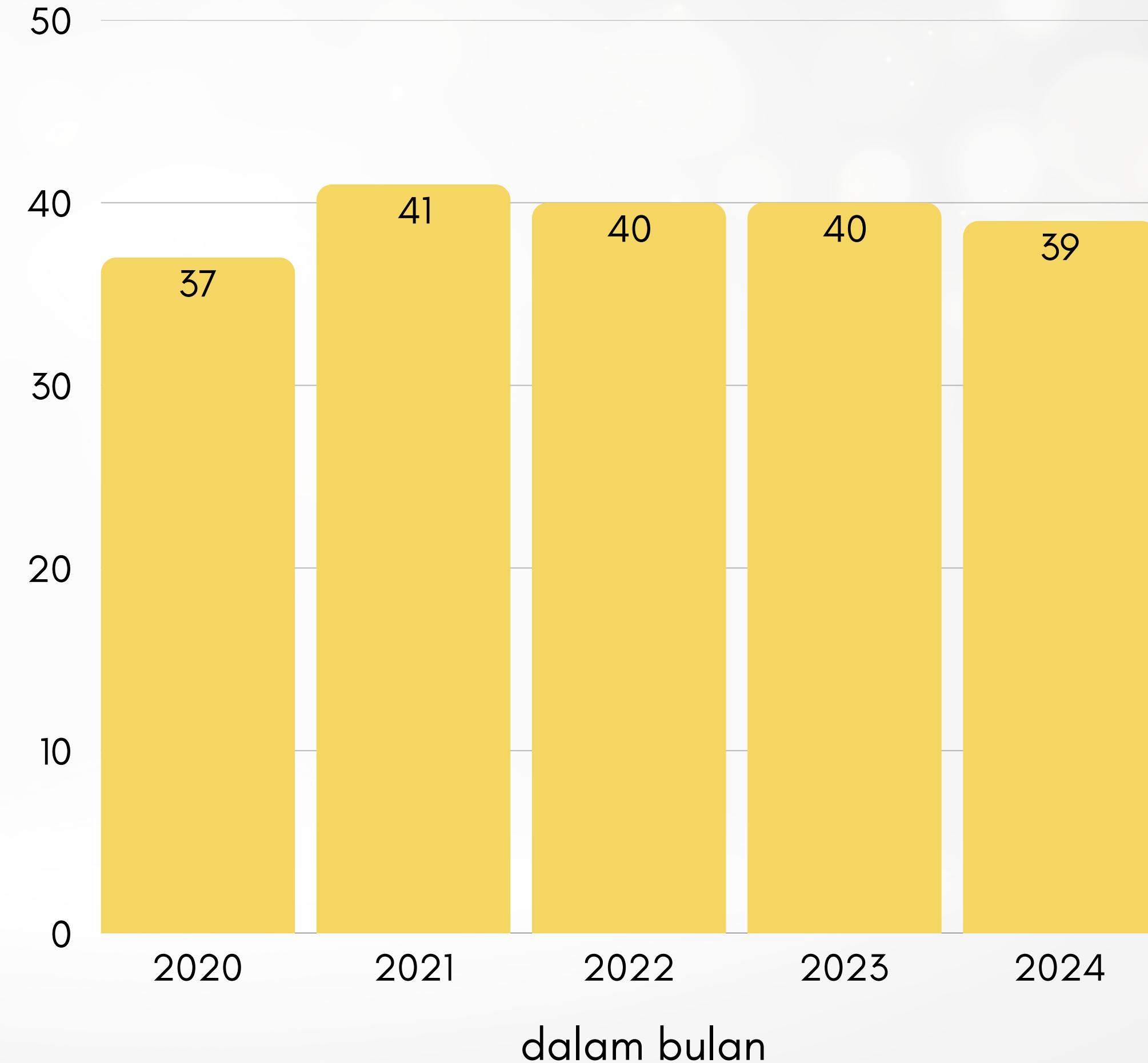
# PEMETAAN **PASAL VONIS**

<b>Pemberi Suap</b>	<b>Penerima Suap</b>
Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b	Pasal 5 ayat (2)
Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b	Pasal 6 ayat (2)
Pasal 13	Pasal 11
	Pasal 12 huruf a, b, c, d
	Pasal 12B
<b>36 Terdakwa</b>	<b>84 Terdakwa</b>

# PEMETAAN TREN VONIS PENJARA

Rata-rata pidana penjara yang dijatuhkan adalah 3 tahun 3 bulan atau 39 bulan. Terdapat 2 hal yang dapat dijadikan refleksi:

1. Penuntut umum yang masih terlalu fokus pada kasus kecil sehingga penjatuhan rendah
2. Pengadilan belum cukup berani untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat.

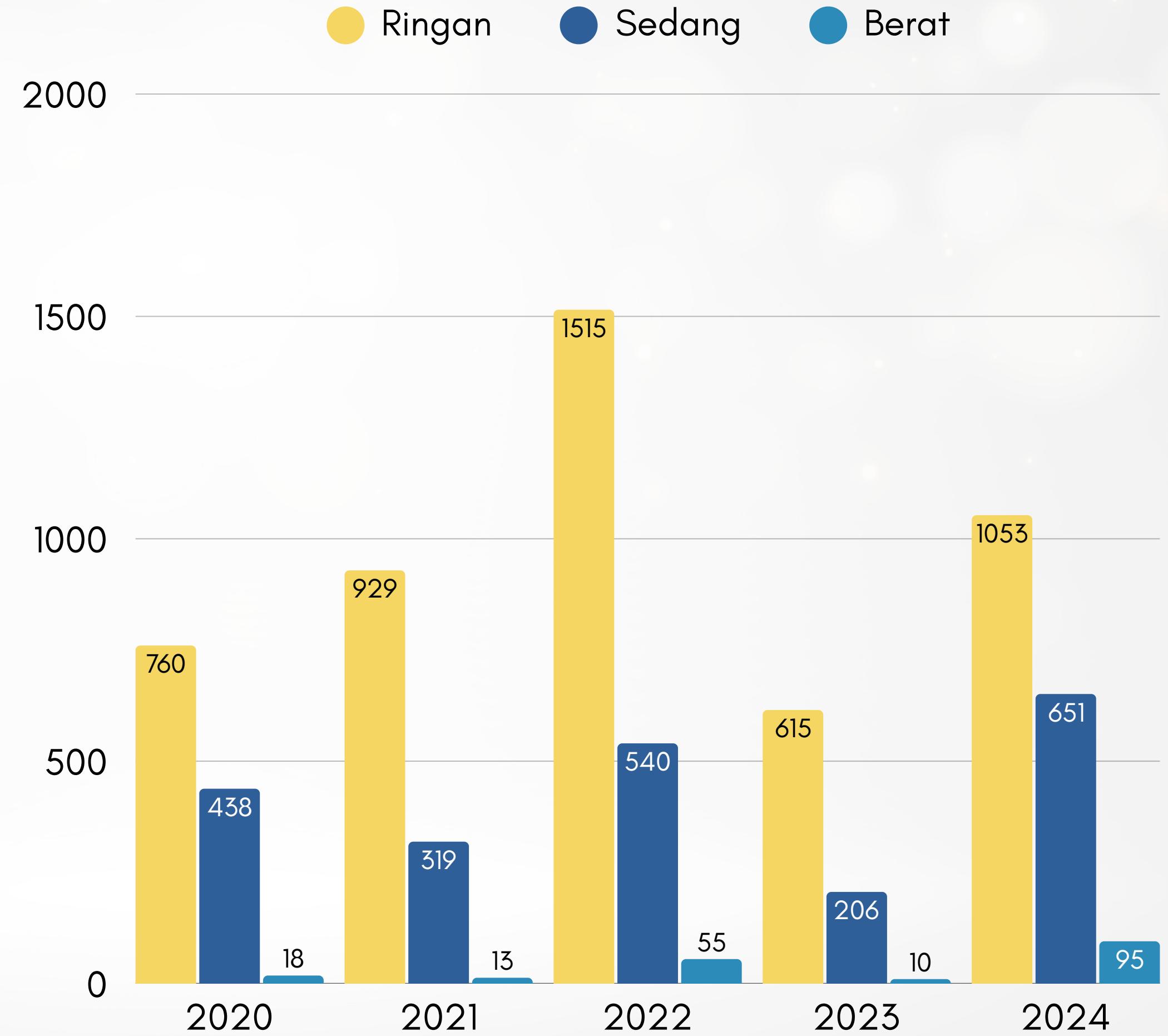


# PEMETAAN TREN VONIS PENJARA

Indikator yang digunakan:

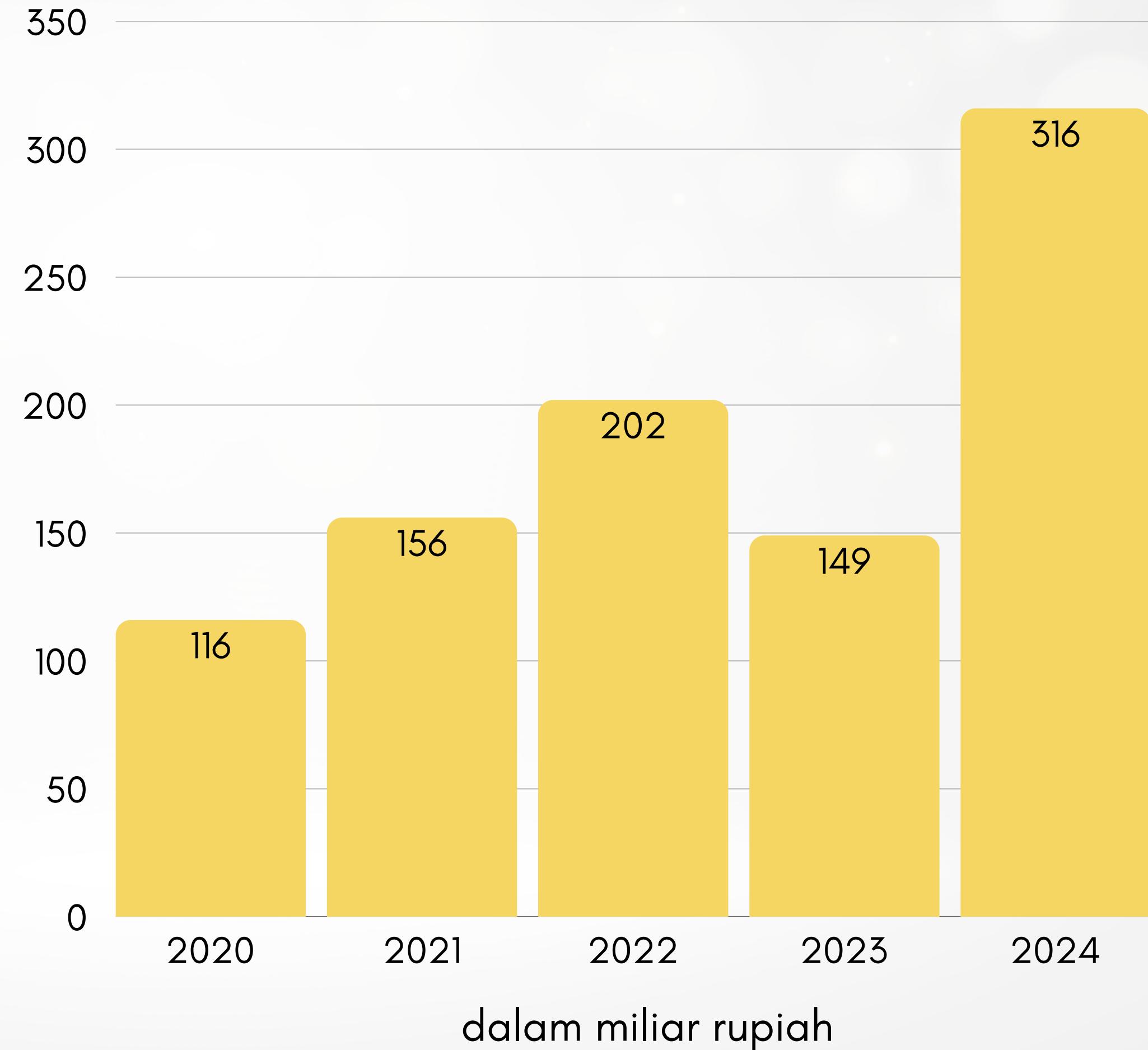
- ringan: kurang dari 4 tahun
- sedang: 4-10 tahun
- berat: di atas 10 tahun

Terdapat kenaikan 95% pada penjatuhan vonis berat, begitu pula dengan vonis ringan yang meningkat hingga 216%.



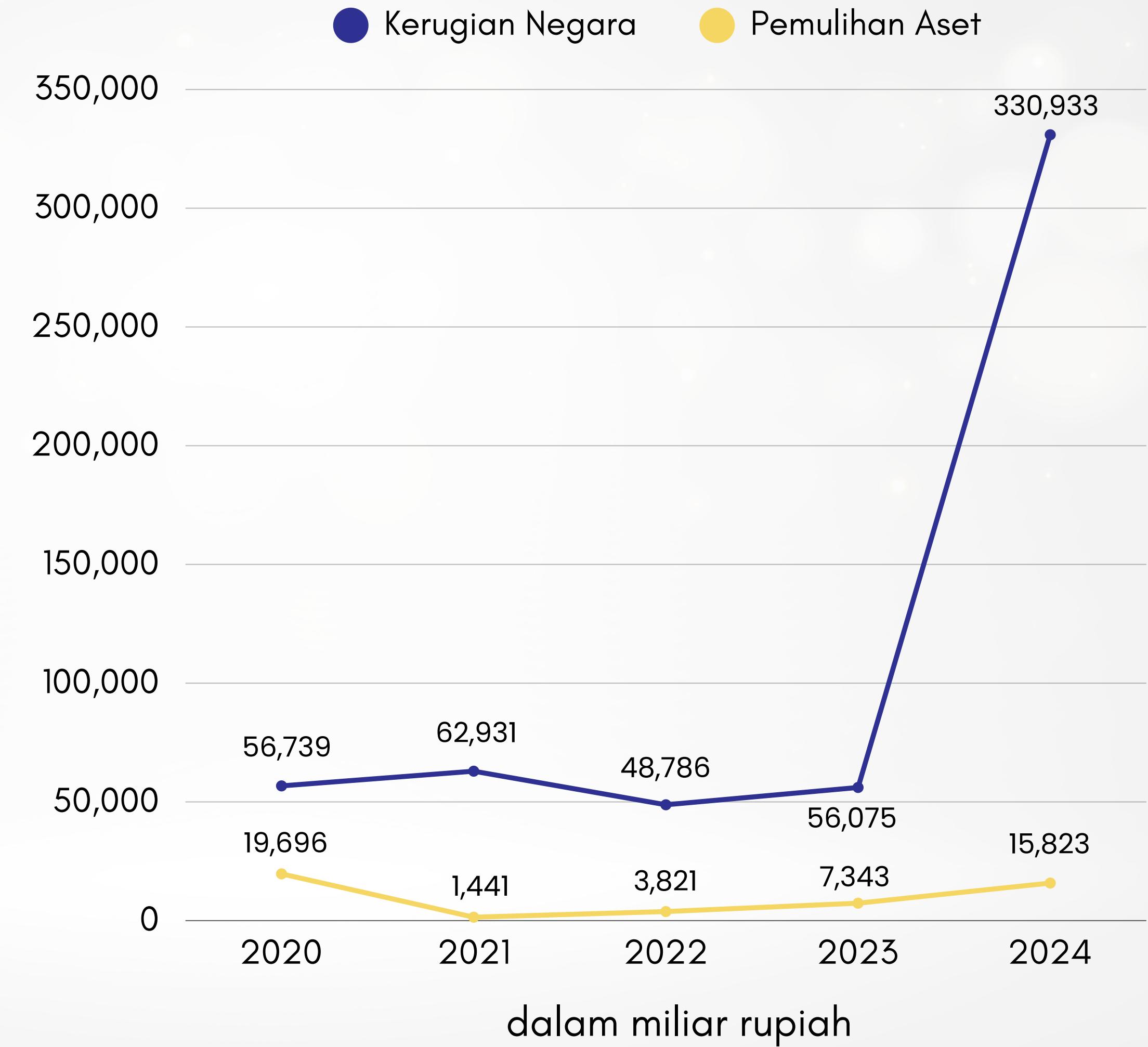
# PEMETAAN TREN VONIS DENDA

- Total pidana pokok berupa denda:  
**Rp316.294.711.000**
- Rata-rata penjatuhan pidana denda:  
**Rp180.296.516**



# PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

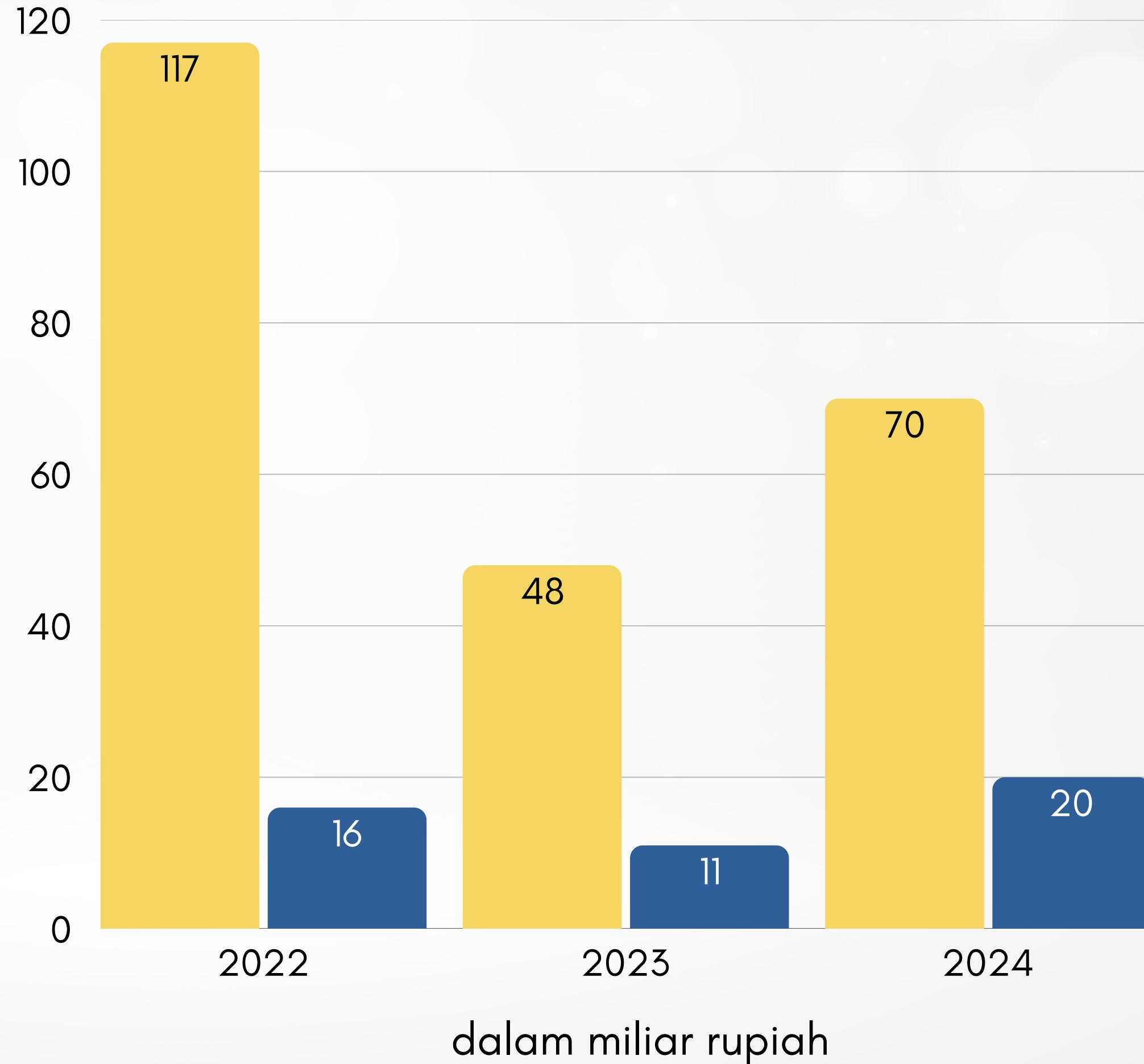
- Pemulihan kerugian negara hanya 4,78% dari total kerugian negara
- Jika ditambah dengan denda, baru menutupi 4,84% kerugian negara atau setara Rp16,13 triliun



# PEMETAAN VONIS BEBAS DAN LEPAS

- Putusan bebas dijatuhkan terhadap 70 terdakwa
- Putusan lepas dijatuhkan terhadap 20 terdakwa

● Bebas ● Lepas



# PEMETAAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN

14  
TERDAKWA  
DIJATUHI  
PIDANA  
TAMBAHAN

23  
TERDAKWA  
TIDAK  
DIJATUHI  
PENCABUTAN  
HAK  
TERTENTU

Pencabutan hak tertentu meliputi:

1. Pencabutan hak politik
2. Pencabutan izin usaha tertentu
3. Larangan mengikuti lelang

# DAFTAR TERDAKWA YANG DIJATUHI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK TERTENTU



**PT Quartee Technologies**  
Korporasi



**Ricky Ham Pagawak**  
Bupati Mamberamo Tengah  
2018-2023



**Erik Adtrada Ritonga**  
Bupati Labuhanbatu 2021-2023

**Mely Hairiya | Luhut Silaban | Edmon | M. Khairil | Rahima | Mesran | Hasani Hamid | Bustami Yahya |  
Hasyim Ayub | Nurhayati | PT MAM Energindo**

# DAFTAR TERDAKWA YANG TIDAK DIJATUHI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK TERTENTU



**Abdul Gafur Mas'ud**  
Bupati Penajam Paser Utara  
2018-2023



**Abdul Gani Kasuba**  
Gubernur Maluku Utara 2019-  
2024

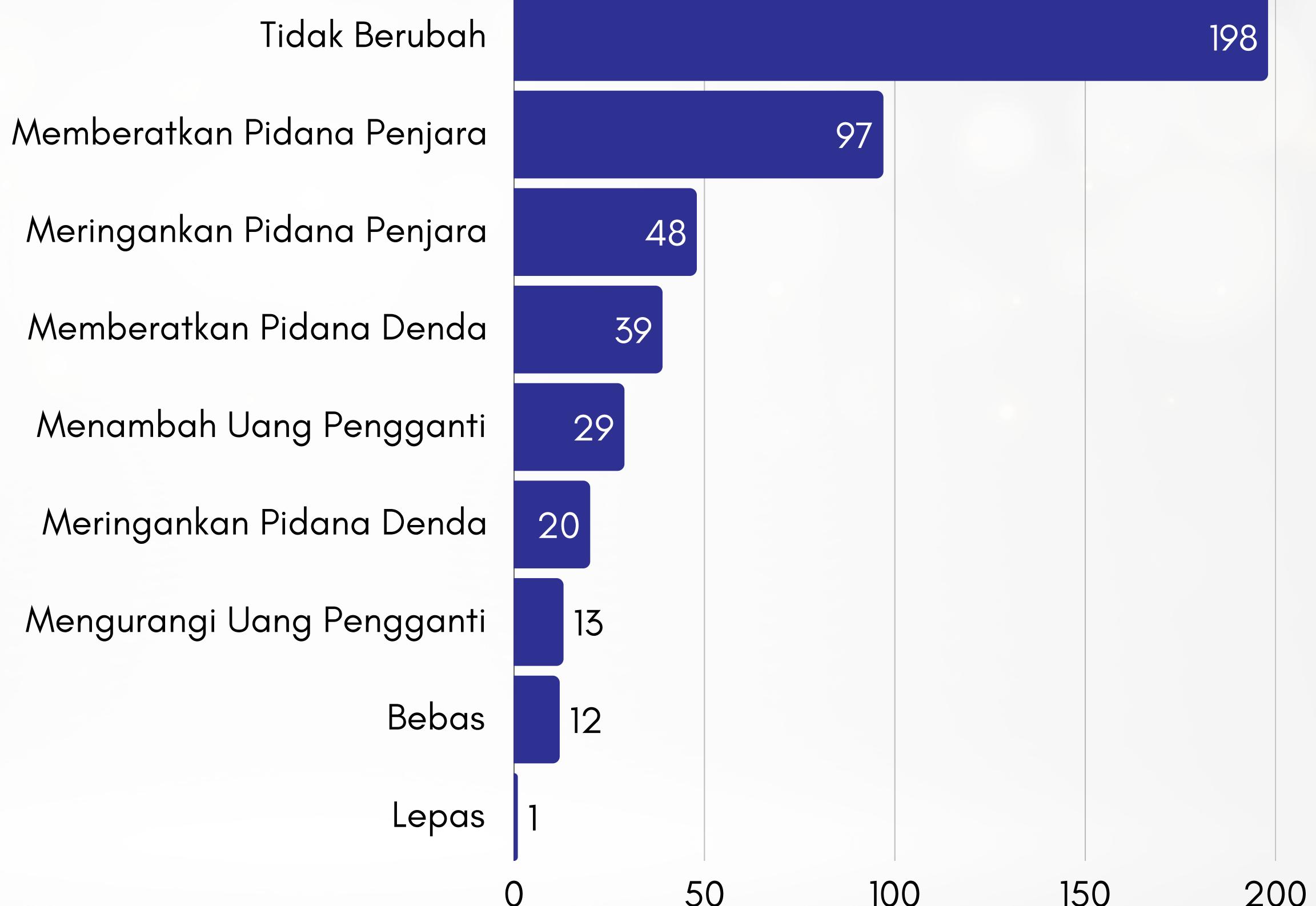


**Muhammad Lutfi**  
Walikota Bima 2018-2023

**La Ode Muhammad Rusman Emba | Ismail Thomas | Ahmad Muhdlior | Adam Rahayaan | Sukarmis | M. Thoib | Naftali Pakopa | Petrus Zonggonau | Petrus Yeimo | Deni Gobai | Habakuk Pigai | Simon Gobai | Otopianus Tagi | Beni Yogi | Pilemon Kayame | Yacob Matius Paru | Syufri Agus | Yusrial Suprianto | Pasaribu | Rudi Syahputra**

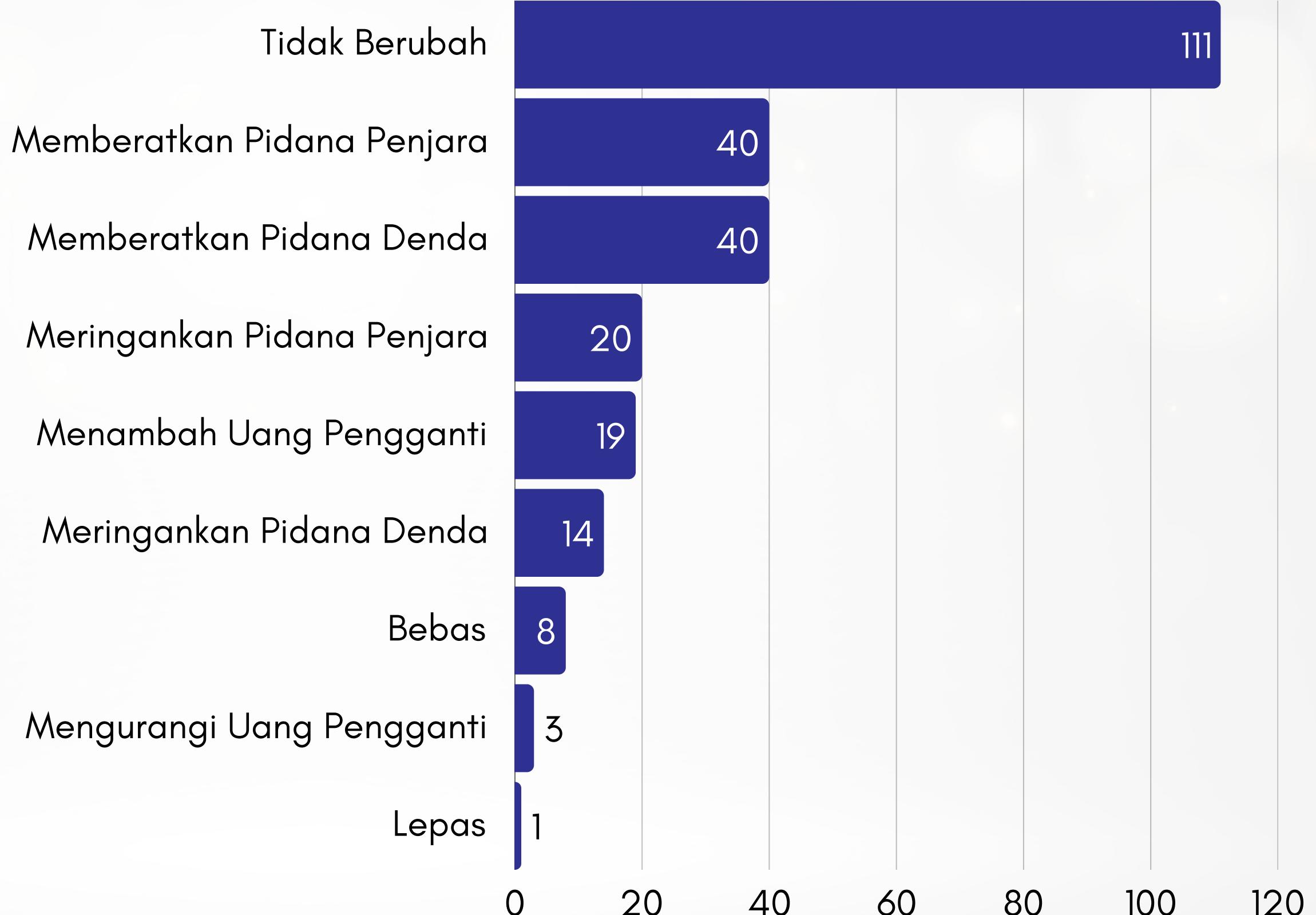
# PEMETAAN PUTUSAN TINGKAT PERTAMA DAN BANDING

- Terdapat kecenderungan PT tidak mengubah putusan tingkat pertama.
- PT juga cenderung memberatkan pidana vonis pidana kepada terdakwa



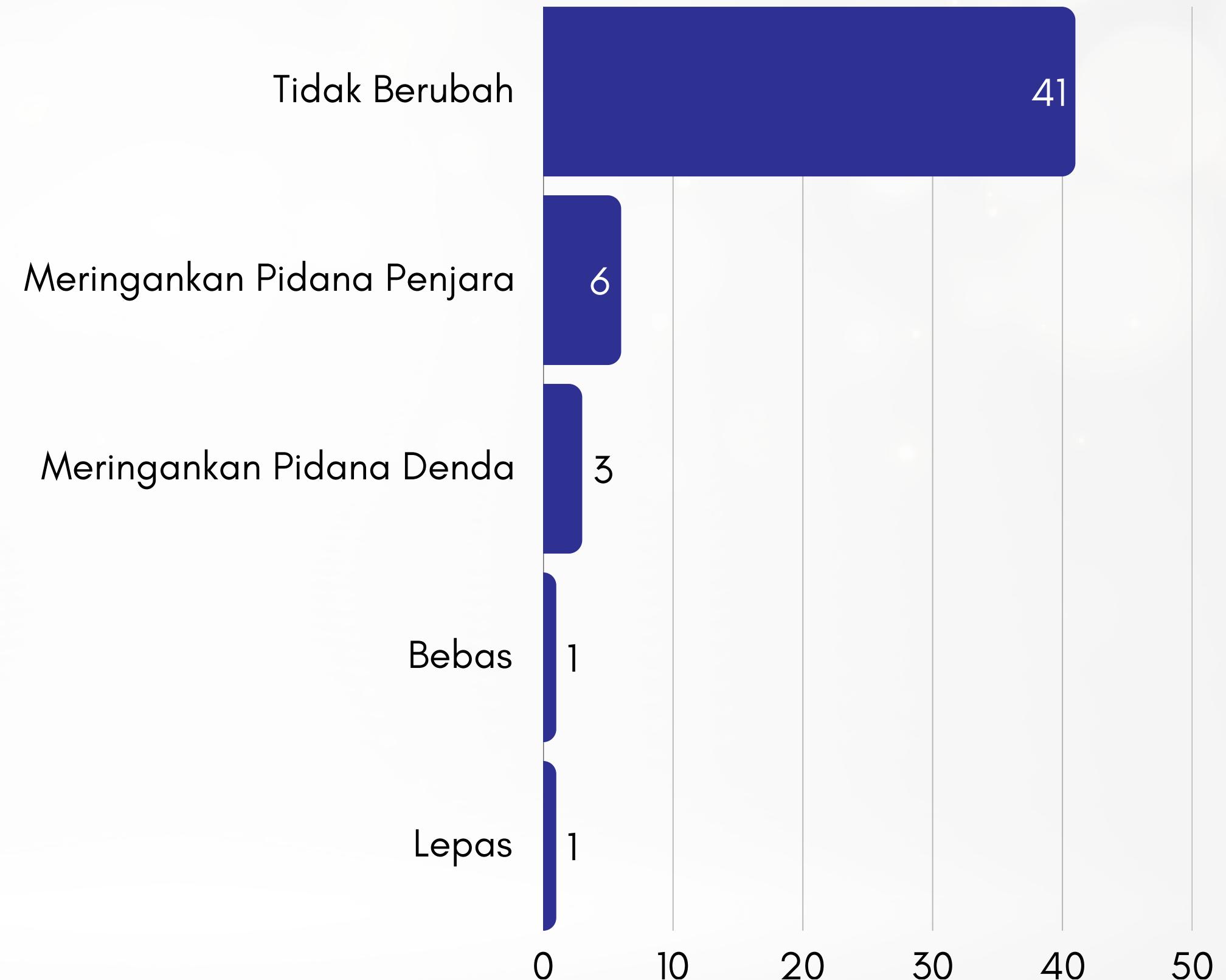
# PEMETAAN PUTUSAN TINGKAT BANDING DAN KASASI

- Terdapat kecenderungan MA tidak mengubah putusan tingkat pertama.
- MA juga cenderung memberatkan pidana vonis pidana kepada terdakwa



# PEMETAAN PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

- Pada PK, terdapat batasan bagi MA untuk tidak menjatuhkan pidana lebih berat.
- Meskipun secara umum tidak mengubah putusan, namun MA setidaknya meringankan penjara pada 6 terdakwa dan meringankan denda pada 3 terdakwa.



# KASUS HIGH PROFILE **KORUPSI TIMAH**



Hakim menilai kerugian keuangan negara berjumlah Rp300 triliun.



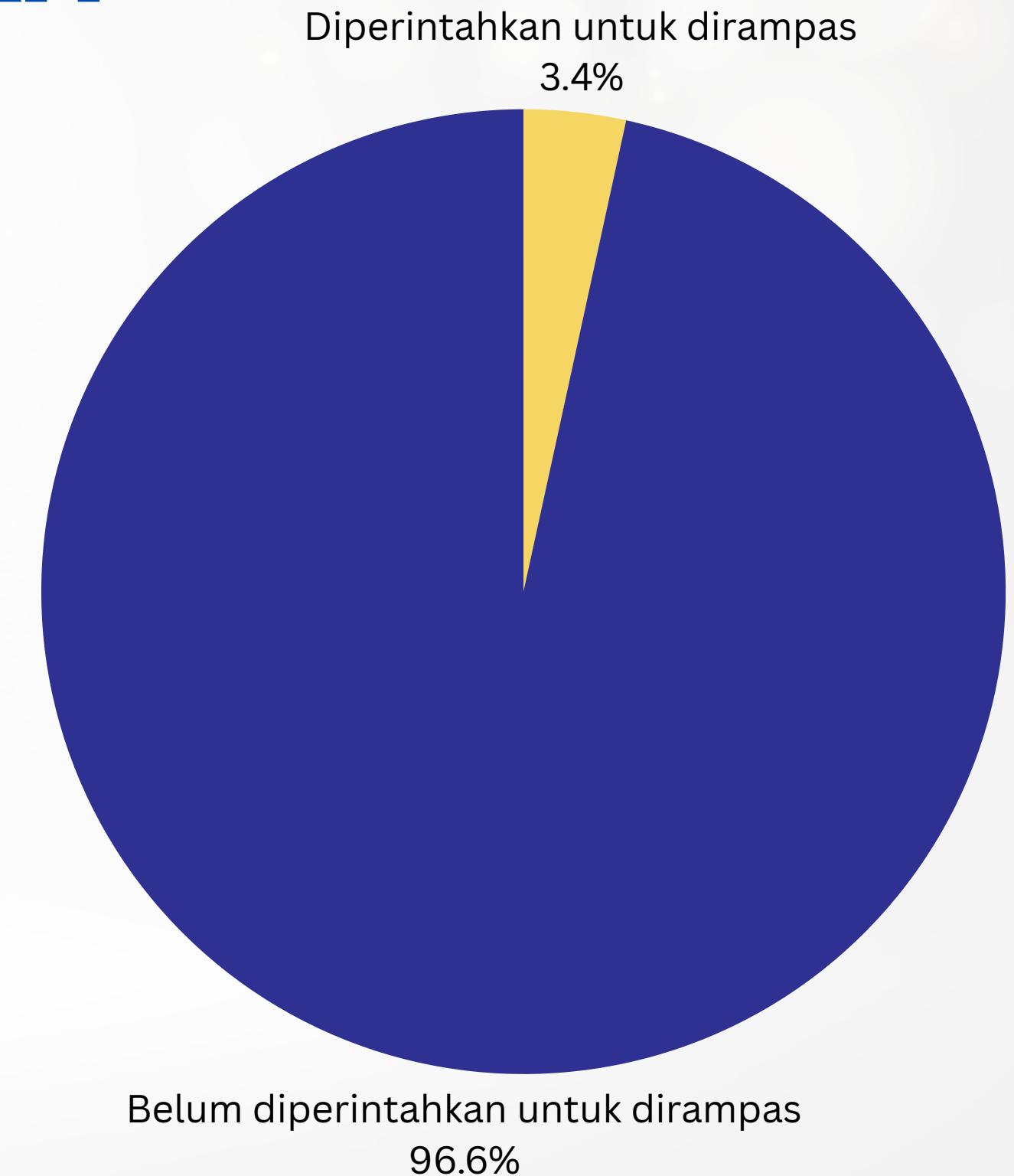
Saat ini, 14 terdakwa tengah mengajukan upaya hukum.



Putusan yang berhasil dihimpun oleh ICW adalah 14 terdakwa yang diputus pada tahun 2024.



Satu terdakwa, Suparta, meninggal dunia saat almarhum tengah mengajukan upaya hukum.



# KENDALA GUGATAN PERDATA PADA TIPIKOR

Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UU Tipikor:

Mengatur mengenai mekanisme yang ditempuh jika penyidik kekurangan bukti namun secara nyata telah ada kerugian negara dan dalam kondisi tersangka atau terdakwa meninggal dunia, dapat dilakukan gugatan perdata.

1

PERMA No. 1 Tahun 2016 mewajibkan seluruh sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan untuk dilakukan melalui mediasi.

2

Prinsip pembuktian pada hukum perdata menggunakan prinsip siapa yang mengajukan tuduhan, ia yang harus membuktikan kebenarannya. Hal ini mempersulit pembuktian sebab yang menguasai aset adalah pelaku,

3

Mekanisme eksekusi putusan perdata secara teknis berbeda dengan mekanisme eksekusi putusan pidana.

# KORUPSI KEBENCANAAN



Kerugian negara hingga Rp14,2 miliar sepanjang 2024.



Modus berkisar antara korupsi bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pengadaan alat metrologi, dan relokasi mandiri korban bencana alam.

Pemerintah perlu fokus pada upaya pencegahan korupsi pada kasus kebencanaan. Sebab, sesedikit apapun korupsi yang dilakukan akan berdampak pada korban bencana. Jangan sampai korban bencana kembali menjadi korban korupsi karena tata kelola keuangan yang buruk.

# KESIMPULAN

Terdapat perbaikan signifikan dalam ketersediaan putusan MA, meski sebagian masih tidak dapat diakses.

Pekerjaan terdakwa dan terpidana didominasi oleh pihak swasta (603 orang), disusul pegawai pemerintah daerah (462 orang) dan kepala desa (204 orang). Adapun pemegang jabatan strategis hanya berjumlah 110 orang.

Kategori perkara didominasi oleh utilitas (322 putusan), disusul desa (310 putusan), pemerintahan (282 putusan), perbankan (153 putusan), dan pendidikan (129 putusan).

Rata-rata tuntutan uang pengganti mencapai Rp18 miliar, dengan total Rp25,44 triliun. Tuntutan pencabutan hak politik diajukan terhadap 13 terdakwa, pencabutan izin usaha terhadap 1 terdakwa, dan larangan mengikuti proyek pemerintah terhadap 1 terdakwa.

Jumlah putusan yang dihimpun mencapai 1.768, terdiri atas 1.168 putusan tingkat pertama, 358 banding, 193 kasasi, dan 49 peninjauan kembali.

Provinsi terbanyak yang menangani perkara tipikor adalah Sumatera Utara (148 perkara), Jawa Timur (129 perkara), dan Sulawesi Selatan (123 perkara).

Korupsi dengan dimensi kerugian keuangan negara tetap mendominasi dengan 1.601 terdakwa, disusul suap menyuap (98 terdakwa) dan pemerasan (28 terdakwa).

Pasal pencucian uang dikenakan hanya pada 25 terdakwa, dengan 3 perkara yang dipisah (splitsing). Sebanyak 1 terdakwa awalnya didakwa TPPU, namun pasal tersebut tidak dilanjutkan dalam tuntutan.

Tuntutan dari Kejaksaan RI dan KPK cenderung berada pada kategori sedang: 788 terdakwa dituntut ringan, 955 sedang, dan 79 berat.

## KESIMPULAN

Rata-rata hukuman penjara pada 2024 adalah 3 tahun 3 bulan. Vonis terberat mencapai 16 tahun, sedangkan yang paling ringan 10 bulan. Sebanyak 1.053 terdakwa divonis ringan, 651 sedang, dan 95 berat.

Vonis berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dikenakan pada 437 terdakwa, Pasal 3 pada 1.123 terdakwa, Pasal 11 pada 39 terdakwa, dan Pasal 12 huruf a pada 25 terdakwa.

Hakim menjatuhkan pidana tambahan kepada 14 terdakwa: 12 pencabutan hak politik, 1 penutupan usaha, dan 1 pencabutan izin usaha. Namun, 22 terdakwa yang menjabat kepala daerah atau anggota legislatif tidak dikenai pencabutan hak politik.

Mahkamah Agung tidak mengubah pidana terhadap 111 terdakwa, namun terdapat kecenderungan pemberatan hukuman penjara pada 40 terdakwa, denda pada 40 terdakwa, dan uang pengganti pada 19 terdakwa.

Kejaksaan RI unggul dalam menuntut hukuman penjara maksimal 20 tahun, dibanding KPK yang 15 tahun, serta menuntut denda hingga Rp75 miliar dan uang pengganti Rp4,57 triliun.

Pada tahun ini, denda yang dijatuhkan mencapai Rp316 miliar dengan rata-rata Rp180 juta, sedangkan uang pengganti totalnya Rp16,58 triliun dengan rata-rata Rp14,3 miliar. Total pengembalian dari denda dan uang pengganti hanya sebesar 4,84% dari keseluruhan kerugian keuangan negara.

Hakim menjatuhkan vonis bebas kepada 70 terdakwa dan vonis lepas kepada 20 terdakwa sepanjang 2024.

Sulitnya mengusut terdakwa korupsi yang meninggal, seperti kasus tata niaga timah, menegaskan pentingnya aturan perampasan aset berbasis in rem.

Terdapat kecenderungan kenaikan vonis penjara pada 97 terdakwa di tingkat banding, denda bertambah untuk 39 terdakwa, dan uang pengganti meningkat bagi 29 terdakwa. Sebanyak 198 terdakwa tidak mengalami perubahan vonis, sementara Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis bebas pada 12 terdakwa dan lepas pada 1 terdakwa.

## KESIMPULAN

Pada 2024, kerugian keuangan negara didominasi kasus izin timah di Bangka Belitung senilai Rp300,003 triliun, dari total keseluruhan Rp330,934 triliun. Nilai suap tercatat Rp111,301 miliar dari pemberi dan Rp455,048 miliar dari penerima. Pungutan liar mencapai Rp41,218 miliar, sedangkan pencucian uang sebesar Rp7,815 miliar.

# REKOMENDASI MAHKAMAH AGUNG

1

Meningkatkan keterbukaan melalui pengembangan Direktori Putusan Mahkamah Agung agar publik dapat memantau secara konsisten putusan tindak pidana korupsi.

2

Memperkuat fungsi Badan Pengawas untuk memastikan integritas hakim dan mencegah praktik pelanggaran etik.

3

Menetapkan pedoman pemidanaan suap, gratifikasi, maupun pungutan liar dan menetapkan pedoman hukum acara yang berlaku untuk gugatan perdata pada kasus korupsi.

# REKOMENDASI KOMISI YUDISIAL

1

Aktif memantau dan menanggapi fenomena penjatuhan pidana ringan oleh hakim dalam perkara korupsi yang besar, atau kasus yang berdampak secara sistemik ke masyarakat.

2

Secara aktif memberikan rekomendasi etik maupun kebijakan kepada Mahkamah Agung agar pemidanaan terhadap pelaku korupsi bisa lebih bernilai keadilan.

# REKOMENDASI KEJAKSAAN RI DAN KPK

1

Mengembalikan fokus pada penanganan kasus korupsi yang besar dan berdampak sistemik, bukan hanya pelaku di level menengah dan rendah.

2

Perlu memaksimalkan penggunaan Pasal 18 UU Tipikor dan ketentuan dalam UU TPPU untuk memaksimalkan aspek pemulihan aset negara.

# REKOMENDASI PEMERINTAH DAN DPR

1

Segera membahas RUU Perampasan Aset dan RUU Tipikor untuk memperkuat kerangka hukum dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dan menutup celah hukum yang masih dimanfaatkan pelaku korupsi.

2

Segera membahas hukum acara perdata untuk menjalankan gugatan perdata pada kasus korupsi sebagai dasar untuk melaksanakan Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 UU Tipikor.

3

Meningkatkan fungsi pencegahan untuk meminimalisir terjadinya korupsi, terutama di level pembuat kebijakan dan posisi strategis.



# TERIMA KASIH

[antikorupsi.org](http://antikorupsi.org)